PTKM Langkah Terbaik Cegah Penularan Covid -19

KR-Sukro Riyadi

Petugas Satpol PP Bantul memberikan sosialisasi di kawasan Parangkusumo Kapanewon Kretek.

KRETEK (KR) - Program Operasi Patuh Covid-19 dipusatkan di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Senin (18/1) malam. Tim gabungan dari unsur Satpol PP, Polres, TNI, Dinas Perhubungan dan relawan Covid-19 menggelar penertiban terkait Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) bertepatan malam Selasa Kliwon di Pantai Parangkusumo.

Merujuk data kantor Satpol PP Kabupaten Bantul, terhitung 11-19 Januari 25 lokasi dilakukan pembubaran paksa diikuti penutupan 2x24 jam.

Dalam penertiban itu, petugas terus memperingatkan agar wisatawan pulang. Namun imbauan tersebut tidak digubris pengunjung. Petugas bergerak ke Cepuri dengan membawa baterai sangat terang dan meminta wisatawan segera meninggalkan Cepuri.

"Ketika malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon kawasan Cepuri dan Pantai Parangkusumo ramai dengan orang yang melakukan ritual," ujar Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta, Selasa (19/1).

Dijelaskan, masa PTKM akan berakhir 25 Januari, sejumlah aktivitas dibatasi mulai buka tutup objek wisata, kegiatan ekonomi seperti toko kelontong dan sejenisnya maksimal buka pukul 19.00. Di Pantai Parangkusumo hanya sampai pukul 18.00. Sehingga langkah membubarkan wisatawan malam karena melanggar PTKM dan berpotensi terjadinya kerumunan. Dalam penegakan PTKM, tempat karaoke di Parangkusumo juga sempat disisir, namun semua tutup.

Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, M Agung Kurniawan, menambahkan selama masa PTKM total jumlah pelanggaran sebanyak 160 kasus. Dari jumlah itu 135 lokasi diberikan surat teguran. "Sebanyak 25 lokasi dilakukan pembubaran paksa diikuti dengan sanksi penutupan 2x24 jam," ujar Agung.

Selama melaksanakan Operasi Patuh Covid-19, petugas kerap menemui banyaknya masyarakat yang mengabaikan instruksi pemerintah. "Mereka sebenarnya sudah mengetahui kebijakan yang berlaku pada masa PTKM 11 hingga 25 Januari 2021, tapi dengan dalih kebutuhan ekonomi mereka melanggar," ujar Agung.

Sedangkan pemerintah dalam menerbitkan instruksi tersebut sudah mempertimbangkan agar roda perekonomian masyarakat berjalan. "Sekali lagi pemerintah tidak melarang masyarakat beraktifitas, melainkan mengatur dengan pembatasan dan hal ini adalah langkah terbaik untuk mengurangi penyebaran Covid-19," tuturnya. **(Roy)-f**

Layanan Disdukcapil Dibatasi

BANTUL (KR) - Selama Peengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan pembatasan pelayanan. Hal ini dilakukan supaya pelayanan tetap berjalan optimal meski sebagian petugas Disdukcapil menerapkan Work From Home (WFH).

"Selama PTKM, perkantoran diminta untuk menerapkan WFH 75 persen bagi karyawannya dan 25 persen lainnya bekerja di kantor. Jadi untuk layanan tetap berjalan seperti biasa. Karena ada pengurangan personel 25 persen, jadi kami batasi antreannya. Ada yang ubah data, urus akta kematian, akta kelahiran, cetak KTP dan lain-lain," urai Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi, Selasa (19/1).

Diungkapkan, hal ini dilakukan untuk menyiasati tingginya permohonan. Adapun cara menyiasati yakni pihaknya melakukan pembatasan antrean layanan. Untuk legislasi dibatasi 30 antrean perhari dan perekaman e-KTP dibatasi 20 antrean perhari.

Di bagian lain, Bambang juga menyatakan pelayanan Disdukcapil juga dapat menggunakan daring melalui aplikasi Disdukcapil Smart. "Semua layanan bisa diakses melalui aplikasi ink kecuali perekaman e-KTP yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor. Adapun layanan daring Disdukcapil saat ini justru semakin diminati masyarakat karena cepat, praktis dan tidak harus datang ke lokasi," imbuhnya.

Bambang Purwadi berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Disdukcapil smart untuk mengurus permohonan. Sebab selain lebih cepat, layanan daring juga dapat menekan penularan Covid-19. **(Aje)-f**

TEMBOK RUMAH WARGA AMBROL

Ribuan Warga Tinggal di Lokasi Rawan Longsor

BANTUL (KR) - Hujan deras kembali memicu terjadinya longsor di Dusun Ketos Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri. Tembok rumah Warijan (57), ambrol tidak kuasa menahan terjangan material tanah. Kerusakan tembok sepanjang 8 meter dengan ketinggian 2 meter.

Lurah Sriharjo Kapanewon Imogiri, Titik Istiwayatun Khasanah SPd, Selasa (19/1), mengatakan musibah tersebut terjadi Senin (18/1) malam. Sebelum kejadian hujan turun sangat deras, pemilik rumah mendengar suara gemuruh seperti tanah bergerak.

"Setelah suara gemuruh itu pemilik rumah melihat ke samping rumah dan benar terjadi tanah longsor mengenai dinding rumah hingga rusak," ujar Titik.

Koordinator Lapangan Posko Banjir dan Longsor Kalurahan Sriharjo, Oman, menjelaskan jebolnya tembok dipicu longsoran material tanah. Setelah peristiwa itu, FPRB Sriharjo bersama warga Ketos, Karang Taruna Sriharjo, Bhabinkamtibmas Sriharjo, Tagana Bantul, SAVE Selopamioro, KSB Kebonagung dan BPBD Bantul bergerak melakukan penanganan secepat mungkin.

Terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Drs Dwi Daryanto MSi, mengatakan Bantul merupakan daerah pegunungan yang punya potensi terjadi bencana tanah longsor.

KR-Sukro Relawan

Relawan bergotong-royong melakukan perbaikan rumah di Ketos pasca longsor, Selasa (19/1).

"Merujuk hasil kajian BPBD Bantul, 2.300 lebih kepala keluarga berada di daerah rawan longsor. Artinya potensi bencana longsor di Bantul cukup tinggi," ujar Dwi. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan jika terjadi retakan sementara mengungsi ke tempat aman. **(Roy)-f**

SEBAGAI BAHAN BAKU TAHU

Kedelai Lokal Lebih Unggul

KR-Sukro Riyadi

Nanik Rahayu mengemasi tahu setelah selesai produksi.

BANTUL (KR) - Komoditas kedelai berpeluang sangat besar dikembangkan di Kabupaten Bantul. Namun minat petani dalam mengembangkan kedelai sekarang ini perlu terus dipacu. Menggenjot produksi kedelai di Kabupaten Bantul supaya tidak bertumpu impor perlu sinergitas antar instansi pemerintah.

"Tahun 2020,di Bantul komoditas kedelai dikembangkan di atas lahan 491 hektare. Kemudian tahun 2021, lahan kedelai semakin luas lagi mencapai 700 hektare," ujar Kabid Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kelautan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Bantul, Ir Imawan Eko Handriyanto MP, Senin (18/1).

Imawan mengungkapkan, petani di Kabupaten Bantul sejauh ini memang belum begitu tertarik melakukan budidaya dengan komoditas kedelai. Salah satu faktornya karena harga jual dinilai masih terlalu rendah. "Sebelumnya harga jual kedelai di Kabupaten Bantul masih di kisaran Rp 8.000/kg. Ketika harga di atas angka itu tentu petani tertarik melakukan budidaya kedelai," jelasnya.

Sekarang ini harga mencapai Rp 10.000/kg, tapi petani tidak sedang masa panen. Terkait dengan rata-rata di Kabupaten Bantul saat ini mereka hanya mencapai 2 ton hingga 2,5 ton kedelai kering. Padahal jika dikelola dengan optimal dengan memperhatikan pupuk, membersihkan rumput, produksi bisa diatas 3 ton perhektare.

Dalam upaya mengatrol harga yang terlalu rendah, sebenarnya DPPKP Kabupaten Bantul tengah menjajaki kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga. "Harapannya nanti jika kemitraan terjalin dengan baik sehingga harga bisa lebih tinggi, dengan kondisi animo petani di Kabupaten Bantul melakukan budidaya kedelai semakin tinggi," ujar Imawan.

Sementara salah satu perajin tahu di Dusun Gunung Saren Kidul RT 73 Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Nani Rahayu, mengatakan harga kedelai sekarang masih diangka Rp 9.000/kg. "Harga idealnya itu Rp 8.500/kg nantinya bisa sebanding dengan tahu yang dihasilkan," ujar Nanik.

Dijelaskan, sebenarnya jika kedelai lokal tersedia, perajin akan memilihnya sebagai bahan utama produksi tahu. "Kalau memproduksi tahu dengan kedelai lokal, rasanya lebih enak, lebih gurih tapi kan kedelai lokal dipasaran tidak tersedia," ujarnya.

Terpisah Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Bantul, Suroto, tidak menampik jika minat petani Bantul untuk budidaya tanaman kedelai perlu didorong. Salah satu sebabnya biaya produksi dengan harga jual tidak seimbang. "Biaya yang dikeluarkan petani selama proses penggarapan lahan hingga panen itu tidak bisa ditutup dengan hasil penjualan," ujar Suroto. **(Roy)-d**